

Bab V

Kesimpulan

Revolusi, Islam dan demokrasi sangat kental bila dikaitkan dengan Iran, sebagai Negara yang menganut asas Islam fundamental. Iran yang menganut sistem religi untuk pembentukan sistem pemerintahan mampu menjalankan kerja pemerintahannya tidak seperti Negara dengan sistem religi kuat lainnya, hal ini bisa dilihat pada kenyatannyanya sekarang Iran menjadi satu-satunya negara Islam yang bisa menyangdingkan Islam dengan demokrasi pada cara maupun sistem pemerintahannya. Presiden Iran masa 1997-2001, seorang yang bernama *HujjatulIslam Sayyid Muhammad Khatami*. Beliau berasal dari kubu Reformis, kubu yang dikenal nomor dua setelah kubu Konservatif di negeri tersebut. Sedangkan kubu Konservatif adalah kubu yang banyak mendominasi dalam perpolitikan Iran, banyak bidang yang dikuasai oleh kubu ini, hingga tanggung kepemimpinan spiritual tertinggipun digawangi kubu Konservatif, yaitu *Vilayat-I Faqih*. Fakta tersebut sudah dapat menggambarkan bahwa ternyata seorang dari kubu berlawanan yaitu Reformis dapat menjadi presiden sebanyak dua periode, ini pastinya dikarenakan adanya atmosfer demokrasi dalam tubuh Iran.

Model kekuasaan *Vilayat-I Faqih* terdiri dari butir-butir ideology bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT. Sedangkan Nabi, Imam dan Ulama (*faqih*) merupakan bagian dari pemegang kekuasaan. Model kekuasaan seperti inilah yang sekarang dipraktekkan dalam politik dan pemerintahan di Iran sebagai distribusi Khomeini dimasa revolusi. Khomeini ingin menciptakan Iran sebagai Republik Islam Iran yang didasarkan pada *Vilayat-I Faqih*.

Sebuah stigma dunia bahwa *Vilayat-I Faqih* adalah sebuah konsep yang sangat bertentangan dengan demokrasi telah gagal dengan munculnya bukti nyata dengan keberadaan Negara Iran yang bisa menyanggah dua hal penting yaitu konsep konstitusinya *Vilayat-I Faqih* dengan demokrasi. Menjadikan timbulnya pertanyaan faktor apa yang mendorong Khatami melaksanakan demokratisasi dibawah otoritas doktrin *Vilayat-I Faqih* dalam kehidupan religio-politik negaranya ?

Mungkin ada sebagian orang bertanya dan menganggap bahwa ulama sebagai perwakilan ortodhoks, juga otoritarian dalam peran mereka ditengah masyarakat, akan gagal memimpin sebuah pemerintahan atau negara. Dengan mengaitkan antara agama sebagai visi, dan revolusi sebagai bentuk aksi, keberhasilan kaum ulama dengan revolusi Islamnya bukanlah sesuatu yang asing dan langka. Dalam hal ini agama menjadi landasan dan revolusi merupakan tuntutan zaman, sebagaimana para filosof mentautkan antara filsafat dengan syari'at. Dalam konteks revolusi ini, Tauhid mempunyai fungsi praktis untuk melahirkan keteguhan prilaku. Dan sistem keyakinan mengimplikasikan suatu tujuan transformasi kehidupan manusia dan sistem sosial mereka. Revolusi Tauhid atau revolusi kaum tertindas merefleksikan sistem keyakinan ideology Mazhab Syi'ah.

Vilayat-I Faqih dapat diringkas: Allah SWT adalah pencipta dan hakim mutlak yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Allah juga memilih manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Untuk keselamatan manusia dimuka bumi, Allah memilih orang-orang yang memiliki unsur kepribadian yang murni serta luhur secara fitrah. Merekalah yang berhak memimpin umat yaitu para Nabi, para Imam dan para

Fuqaha. Karena para *anbiya'* sudah berlalu dan *auliya'* atau imam sedang ghaib, maka sekarang umat berada pada periode kepemimpinan para *fuqaha* atau *faqih*¹.

Dan kemudian yang menjadi Faktor-faktor Pendorong bagi Khatami Melaksanakan Demokratisasi di bawah Otoritas Doktrin Vilayat-I Faqih, jelas karena Adanya proses Dialektika Antara Tradisi Demokrasi dan Tradisi Iran, yang akhirnya berdampak pada faktor kultural dan eksternal dan kemudian diadopsi Khatami sebagai dasar pemikirannya dan pertimbangan memutuskan dan melaksanakan hal apapun termasuk terhadap negaranya. Letak proses dialektika antara tradisi Demokrasi dan tradisi iran yang diadopsi Khatami sebagai dasar pemikirannya adalah dengan adanya sebuah perumusan, pertama yaitu; telah adanya tesis yang mengatakan bahwa *Vilayat-I Faqih* yang dimiliki iran sebagai dasar konstitusi tidak sejalan dengan cita-cita Demokrasi, yang menggunakan acuan tolak ukur global adalah negeri barat. Kemudian sebuah anti-tesis menyatakan bahwa Iran adalah negara Islam yang beridentitas kuat terhadap nilai-nilai tradisi Persia yang tidak mungkin dihilangkan, hingga kemudian dalam pemikiran Khatami melahirkan sebuah sintesis bahwa, akulturasi dari dua variabel diatas bisa dilaksanakan, dengan tetap menjalankan proyek demokrasi tanpa melupakan ataupun melepaskan identitas negaranya dari nilai-nilai tradisi yang telah ada, yang akhirnya justru melahirkan wujud demokrasi baru, demokrasi yang sejalan dengan cita-cita revolusi yaitu *Vilayat-I faqih*

Akhirnya, dengan menyadari bahwa *Vilayat-I Faqih* merupakan identitas negara Iran yang teraplikasi dalam konstitusinya, Khatami sebagai seorang

¹ Murtadha Muthahari, *Perspektif Al-Qur'an tentang : Manusia dan Agama*, Mizan, Bandung 1990, hal. 12-13

pemimpin pemerintahan, dapat dilihat dari beberapa kebijakan atau rencana program pemerintahannya berusaha untuk mensejajarkan negaranya dengan negara-negara lainnya secara layak. Ini terbukti seperti disebutkan diatas dengan adanya proyek 'dialog antar peradaban'. Khatami menyadari sebagai seorang intelektual yang juga pernah mengenyam kehidupan belajar diluar negeri bahwa peradaban sangat menentukan jalannya kehidupan bernegara. Bila ingin negaranya maju keserataan dan pengakuan dari negara lain sangat penting bagi negara tersebut. Karena faktor tersebutlah yang akhirnya membuat Khatami mengkombinasikan doktrin negaranya yang sangat anti-barat dengan demokratisasi yang sangat dekat dengan semua negara luar termasuk barat.

Disisi lain, adanya tuntutan rakyat yang menuntut perubahan terhadap kebebasan mereka yang dikekang pemerintahan konservatif yang cenderung orthodox, hingga akhirnya menciptakan kubu Reformis yang memiliki misi kerakyatan, yang kemudian harus bertentangan dengan kubu Konservatif yang berprinsip Islam garis keras. Dari variable inilah yang kemudian memaksa Khatami mau tidak mau harus mengambil jalan tengah dengan bersikap akomodatif terhadap kubu konservatif, sehingga ia akan tetap menjalankan proyek-proyek demokrasiya namun dengan batasan yang tegas dari lembaga *Vilayat-I faqih*.

Dengan rasa nasionalisme tinggi berusaha mewujudkan keinginan Demokrasi bangsanya sebagai tuntutan rakyat juga tuntutan zaman, khatami berusaha terus berjalan dengan berbagai proyek demokrasiya tanpa menanggalkan identitas asli Iran sebagai bangsa Persia yang beridology Syi'ah yang kemudian dimodifikasi pendahulunya Khomeini yaitu *Vilayat-I Faqih*.